

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Pendidikan seringkali dipahami dengan lembaga persekolahan, padahal pendidikan tidak hanya terjadi di lembaga persekolahan namun bisa terjadi di mana saja, karena pengertian pendidikan sangatlah luas. Menurut UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Pendidikan merupakan suatu kegiatan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik dari mulai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang dimilikinya yang diperlukan bagi peserta didik, masyarakat dan bangsa negara. Dapat dilihat bahwa dengan pendidikan peserta didik mampu mempunyai keterampilan sesuai dengan bakatnya untuk digunakan dimasa yang akan datang. Keterampilan yang berkualitas mampu mendorong *out put* pendidikan untuk bersaing di era global yang semakin bebas.

Pendidikan yang terjadi di lembaga persekolahan mempunyai aturan-aturan yang memang sudah valid, terikat, suatu kesatuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Claudio Zaki Dib (1988) "*Formal education corresponds to a systematic, organized education model, structured and administered according to a given set of laws and norms, presenting a rather rigid curriculum as regard objectives, content and methodology*". Ini berarti bahwa pendidikan formal adalah pendidikan sesuai dengan model, pendidikan yang sistematis terorganisir, terstruktur dan dikelola

sesuai dengan himpunan hukum dan norma-norma, menyajikan kurikulum yang kaku sebagai tujuan dan isi serta metodologi. Pendidikan yang terjadi di sekolah dimulai dari jenjang dasar, jenjang menengah dan perguruan tinggi. Aturan berjenjang dan berkesinambungan inilah maka pendidikan di lembaga persekolahan disebut dengan jalur pendidikan formal. Semua yang tertera mulai dari perencanaan sampai evaluasi peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana dan lain-lain di lembaga persekolahan diatur oleh aturan yang mengikat dan berlaku secara nasional oleh pemerintah.

Pada Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014 disebutkan bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah maka dibuatlah kebijakan tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun (Kemendikbud, 2009: 90). Adanya PMU ini memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Pendidikan formal jenjang pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Untuk masuk ke jenjang menengah maka peserta didik harus lulus atau sudah menempuh pendidikan dasar. Semua pembelajaran yang ada di pendidikan menengah lanjutan dari pendidikan yang diajarkan di pendidikan dasar, hanya saja akan mengarah pada yang lebih kompleks. Pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). SMA/MA lebih mengacu pada pembelajaran secara umum, sedangkan SMK/MAK lebih mengacu pada keterampilan khusus yang memang dipilih oleh peserta didik guna memasuki lapangan pekerjaan. Namun, pada Renstra Depdiknas 2010-2014 juga disebutkan bahwa untuk memenuhi

kebutuhan tenaga kerja di berbagai dunia industri maka pemerintah akan meningkatkan jumlah SMK dan membuka jurusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Depdiknas, 2009: 82). Peningkatan jumlah SMK juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dunia industri sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK, sehingga akan mengurangi pengangguran terbuka. Data yang diperoleh dari BPS Nasional (2014: 5) pengangguran terbuka tertinggi yang disumbang dari pendidikan menengah khususnya SMA yaitu berkisar di angka 9,10%.

SMK adalah sekolah yang dijadikan tempat untuk menciptakan lulusan siap kerja dengan keahlian yang dimiliki. Menurut Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah BAB 1 Pasal 1 ayat 3, yaitu pendidikan menengah kejuruan adalah “Pendidikan jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Pengertian tersebut menegaskan bahwa SMK melatih keterampilan-keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa, sehingga setelah lulus bisa langsung masuk dalam dunia kerja, meskipun tidak semua lulusan langsung masuk ke dunia kerja, tapi juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tujuan adanya SMK yaitu menurut Kepmendikbud RI No 490/U/1992 yaitu: (1) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, (2) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat yang mampu bersosialisasi dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, (2) meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan bakat minatnya serta perkembangan jaman, (3) menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional. Tujuan SMK yang

lebih mengarahkan kepada keterampilan dan sikap profesional pada diri siswa, menyebabkan timbulnya berbagai macam jenis peminatan atau sering disebut dengan jurusan atau kelompok.

Secara umum dalam PP N0 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 77K, ayat 5, disebutkan bahwa bentuk peminatan di SMK terdiri dari (1) teknologi dan rekayasa, (2) kesehatan, (3) seni, kerajinan dan pariwisata serta (4) teknologi dan komunikasi. Dari ke-4 peminatan ini dapat dipecah-pecah lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan dari lembaga SMK, karena untuk membuka berbagai jenis peminatan, maka lembaga pendidikan khususnya SMK harus memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Bahkan untuk proses pembelajaran di SMK yang di *setting* untuk 70% praktek dan 30% teori, tidak akan berjalan, hal ini dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh Umar dalam Kompas (2012) Pendidikan di SMK 70% praktek dan 30% teori, baik di sekolah maupun magang di industri. Hal tersebut mengharuskan sekolah memenuhi sarana pendidikan khususnya alat praktik yang memadai. Alat praktik yang memadai adalah pemenuhan alat praktik sesuai dengan jenis jurusan yang ada di SMK. Mengacu pada kurikulum SMK, maka alat praktik harus dipenuhi sesuai dengan jurusan yang ada, karena berkaitan langsung dalam pembelajaran serta berperan dalam pengembangan profesional peserta didik. Tersedianya alat praktik diharuskan dipenuhi secara signifikan, karena sangat berkaitan dengan alat pembelajaran yang secara langsung berhubungan dalam pembelajaran. Secara umum jenis alat praktik yang

harus dipenuhi oleh SMK telah diatur dalam Permendiknas No 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Kejuruan.

Penguatan pada kualitas SMK yang ada saat ini masih terkendala, hal ini dikarenakan kurangnya alat-alat praktik yang ada di SMK. Pemenuhan alat praktik terkendala karena alokasi dana operasional dari pemerintah disamakan antara SMA dan SMK. Padahal seharusnya alokasi dana dilihat dari pemenuhan kebutuhan SMK yang sangat beragam. Marlock dalam Kompas (2012) menyatakan bahwa “Pemerintah mesti memiliki *grand design* yang jelas dalam pembangunan pendidikan vokasi”. Jangan sampai dengan kebijakan perbanyak SMK malah menambah pengangguran yang terdidik, karena kurangnya lapangan kerja serta sifat profesional yang dimiliki. Marlock juga menyebutkan, “Penguatan SMK harus mengarah pada *teaching industry*, selain itu penguatan karakter siswa sesuai dengan dunia usaha maupun wirausaha dalam pembelajaran di sekolah” (Kompas, 2012). Penguatan pembelajaran sesuai *teaching industry* membantu siswa mengembangkan sikap profesionalnya, sehingga setelah lulus mampu menjadi wirausaha maupun bekerja di bidang yang diminatinya.

Peminatan dan jurusan yang beragam kadang membuat SMK *kewalahan* dalam memenuhi sarana pendidikan, hal ini disebabkan karena mahalnya sarana pendidikan yang dibutuhkan SMK. Bahkan seperti yang dilansir dalam Edupost Jogja (2013) menyebutkan hanya 20% dari total 203 SMK di Yogyakarta yang memiliki fasilitas dan sarana yang memadai, sehingga menimbulkan banyak lulusan SMK yang tidak memiliki kecakapan yang profesional. Pemenuhan sarana pendidikan sering terkendala di bagian alat pembelajaran berupa alat praktik yang

digunakan selama pembelajaran. Menurut Kepala BLPT “Sangat merugikan siswa SMK, sebab mereka tidak memperoleh pendidikan keterampilan yang optimal saat lulus dan terjun ke dunia kerja.” (Edupost Jogja, 2013). Penjelasan di atas, bisa dilihat bahwa jika alat praktik tidak memadai, maka akan membuat kurang optimalnya keterampilan yang dimiliki karena tersendat dalam perkembangan profesional pada peserta didik. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot secara langsung digunakan dalam proses pendidikan (Ibrahim, 2004: 2). Sarana pendidikan terdiri dari 3 jenis menurut fungsi dan peranannya yaitu (1) alat pelajaran, (2) alat peraga, (3) media pendidikan (B Suryosubroto, 2004: 114). Alat praktik termasuk dalam kategori alat pelajaran, karena berhubungan langsung dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya pembelajaran di pendidikan kejuruan.

Sarana pendidikan yang memadai berupa alat praktik tetap saja harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan mampu mendukung proses pembelajaran. Proses pengelolaan sarana pendidikan khususnya alat praktik menurut Permen No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyebutkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan mencakup hal: (1) perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, (2) mengevaluasi dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, (3) menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan dan kurikulum, serta (5) melakukan pemeliharaan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. Pengaturan tentang standar pengelolaan yang baik telah disebutkan dalam Permen, namun masih ada permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan

sarana dan prasarana pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan khususnya di daerah Yogyakarta ternyata terlihat masih banyak permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan seperti ada beberapa sekolah yang kekurangan anggaran dalam memenuhi kebutuhan, tidak adanya tempat penyimpanan khusus, kurang maksimalnya pemeliharaan karena keterbatasan sumber daya, serta lamanya kurun waktu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah rusak.

Data yang diperoleh dari Solo Pos (2013) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan satu-satunya sekolah berstatus swasta yang pernah masuk dalam Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Status sekolah RSBI SMK Muhammadiyah 3 membuat sekolah berlomba-lomba dalam memenuhi kompetensi lulusan dari berbagai aspek khususnya pemenuhan standar sarana pendidikan. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga memiliki animo terbanyak dalam pendaftaran siswa baru, sehingga membuat sekolah lebih bersemangat dan lebih tertantang untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Animo terbanyak di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (2014) yaitu di peringkat pertama dari 25 Sekolah Mengah Kejuruan Swasta dengan jumlah siswa baru pada tahun 2014/2015 mencapai 480 siswa di Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh dari BAN S/M SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki nilai akreditasi A. Penilaian akreditasi diambil dari berbagai standar yang telah ditetapkan seperti standar biaya, standar sarana, standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, dan standar pendidik. Standar sarana pendidikan SMK

Muhammadiyah memiliki nilai yang tinggi yaitu 97. Nilai 97 berarti bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi dan memiliki sarana yang memadai.

Berdasarkan hasil studi awal penelitian di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang dilakukan oleh peneliti pada bulan November 2014 menunjukkan sarana pendidikan yang memadai dari mulai alat peraga, alat pembelajaran dan media pembelajaran membuat SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mendapat banyak prestasi yang diraih oleh para siswa. Tercukupinya sarana pendidikan, siswa-siswi bisa mengeksplorasi semua bakat dan kemampuannya untuk mengikuti berbagai lomba. Hal ini bisa dilihat dengan beberapa prestasi diraih oleh SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta setiap tahun rutin mendapat juara LKS (Lomba Kompetensi Siswa) yang diraih di jurusan yang berbeda. Pada tahun 2014 SMK Muhammadiyah berhasil mendapat juara 1 LKS di jurusan Teknik Sepeda Motor. Pada tahun 2013 diantaranya Juara 2 Lomba Desain Grafis (Poster) tingkat SMA-SMK-Sederajat se DIY, Juara 1 Lomba Teknologi Tepat Guna Kota Yogyakarta, Juara Harapan 2 Lomba Teknologi Tepat Guna Kota Yogyakarta. Prestasi-prestasi yang diraih tersebut membuktikan bahwa SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mampu memberikan fasilitas untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat para siswa, sehingga menghasilkan suatu prestasi yang gemilang. Semua pelatihan yang dilakukan sebelum lomba diadakan, sarana khusus untuk pelatihan disediakan dari anggaran yang memang sudah dipersiapkan untuk lomba, sehingga sarana dan prasarana yang diperlukan dapat diperoleh oleh siswa-siswi.



SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mendapat SK di tahun 2014 dari propinsi untuk menjadi sekolah berbudaya industri, karena semua jurusan yang ada sesuai dengan konsep industri. Pemberlakuan sekolah berbudaya industri membuat SMK Muhammadiyah harus melengkapi semua alat praktik di setiap jurusan, sehingga siswa mampu melakukan pembelajaran praktik yang telah didapat dalam teori. Model sekolah berbudaya industri akan berjalan lebih efektif jika didukung dengan pemenuhan alat-alat praktik baik di sekolah maupun magang langsung di industri. Namun, yang lebih penting adalah alat praktik yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran.

Sarana pendidikan berupa alat praktik yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan, namun dalam pengelolaannya masih kekurangan sumber daya manusia. Kegiatan pengelolaan sarana pendidikan menurut B Suryosubroto (2004: 115) terdiri dari “Penentuan kebutuhan, proses pengadaan, pemakaian, pencatatan/pengurusan, dan pertanggung jawaban”. Pengelolaan yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta meliputi kegiatan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Kegiatan tersebut dijadikan satu antara pengelolaan alat praktik dan prasarana lainnya. Kegiatan pengelolaan tersebut yang dianggap paling penting adalah pada bagian pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan. Hasil studi awal penelitian, pihak sekolah mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kendala dan hambatan dalam tata kelola alat praktik.

Kendala dan hambatan yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta terkait pengelolaan alat praktik beragam. Hal ini membuat peneliti ingin melihat secara seksama kegiatan pengelolaan alat praktik yang ada, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga dalam mengatasi bahkan memperbaiki pengelolaan yang dianggap masih kurang baik, serta sebagai refleksi bagi sekolah terhadap pengelolaan yang dilakukan selama ini.

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang mempunyai alat praktik yang memadai, serta memiliki prestasi dan sekolah yang berbasis budaya industri membuat peneliti ini mengetahui lebih detail tentang pengelolaan alat praktik yang ada di dalamnya. Pengelolaan sarana pendidikan yang luas serta didukung dengan banyaknya peralatan yang ada di SMK Muhammadiyah 3, maka dari itu akan dilakukan penelitian tentang pengelolaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latarbelakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penguatan pada kualitas SMK yang ada saat ini masih terkendala, hal ini dikarenakan kurangnya alat praktik yang ada di SMK
2. Terjadi kekurangan anggaran dalam memenuhi kebutuhan dalam proses pengadaan
3. Tida ada tempat penyimpanan khusus alat praktik di SMK
4. Kurang maksimalnya pemeliharaan karena keterbatasan sumber daya

5. Kurun waktu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan membutuhkan waktu yang lama
6. Pengelolaan alat praktik terfokus hanya pada pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
7. Berdasarkan temuan awal penelitian masih ditemui adanya kendala dalam pengelolaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang diambil peneliti adalah mengenai pengelolaan alat praktik yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mulai dari pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah yang diambil maka dalam penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengadaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
2. Bagaimana inventarisasi alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
3. Bagaimana penyimpanan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
4. Bagaimana penggunaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
5. Bagaimana pemeliharaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?
6. Bagaimana penghapusan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengadaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

2. Inventarisasi alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
3. Penyimpanan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
4. Penggunaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
5. Pemeliharaan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta
6. Penghapusan alat praktik di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoretis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang mata kuliah manajemen sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan khususnya di bidang pengelolaan alat praktik di SMK

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian sebagai refleksi bagi untuk melakukan kegiatan pengelolaan alat praktik di SMK

#### b. Bagi Pengelola Sarana dan Prasarana Sekolah

Sebagai referensi dalam mengambil kebijakan yang berkaitan tentang pengelolaan alat praktik di SMK

#### c. Bagi Guru

Mampu berpartisipasi dalam penggunaan dan pemeliharaan alat praktik yang digunakan secara maksimal